BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024 menandai tonggak penting dalam transisi politik Indonesia, dengan terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebagai figur yang dikenal karena latar belakang militer serta rekam jejak panjang dalam kontestasi politik nasional, Prabowo kini memikul tanggung jawab besar dalam menghadapi kompleksitas tantangan domestik dan internasional. Dalam konteks global, posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah (*middle power*) di kawasan Asia Tenggara menuntut perumusan kebijakan luar negeri yang strategis dan visioner, khususnya dalam merespons dinamika rivalitas antara dua kekuatan besar dunia, yaitu Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok (Wicaksana & Yakti, 2025). Kedua negara tersebut tidak hanya merupakan aktor dominan dalam sistem internasional, tetapi juga pemangku kepentingan utama dalam bidang ekonomi, keamanan, dan teknologi yang secara langsung mempengaruhi lanskap geopolitik kawasan (Habir & Negara, 2025).

Menghadapi realitas dunia yang semakin *multipolar* dan penuh ketidakpastian, Indonesia berada dalam dilema strategis yang memerlukan ketajaman diplomatik serta kehati-hatian dalam menavigasi kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri yang mengedepankan fleksibilitas, pragmatisme, dan otonomi strategis menjadi kunci dalam mempertahankan kedaulatan serta posisi tawar Indonesia di panggung internasional (Mubah, 2019). Dalam kerangka ini, strategi *hedging* mendapatkan signifikansi yang tinggi sebagai pendekatan kebijakan luar negeri yang tidak berpihak secara eksklusif pada satu blok kekuatan global. Strategi ini memungkinkan negara untuk menjalin kerja sama saling menguntungkan dengan kedua belah pihak yang bersaing, sembari menjaga kebebasan bertindak untuk menghindari

keterikatan struktural yang dapat membatasi otonomi nasional (Tan & Soong, 2022).

Kepemimpinan Prabowo Subianto yang dikenal pragmatis dan berorientasi pada stabilitas (Slater, 2024), diproyeksikan akan mempertahankan bahkan memperkuat praktik *hedging* sebagai kerangka utama kebijakan luar negeri Indonesia. Dari perspektif teoritis, *hedging* mencakup pendekatan multidimensi yang menyatukan elemen *engagement* dan *deterrence* secara simultan, yakni membangun kerja sama yang produktif, sekaligus mempertahankan opsi-opsi strategis untuk memitigasi risiko eksternal (Tran & Sato, 2018; Vinodan & Kurian, 2024). Dalam konteks hubungan dengan Tiongkok, Indonesia telah memperlihatkan keterbukaan terhadap proyek-proyek besar seperti Belt and Road Initiative (BRI) yang telah memberikan dampak positif berupa peningkatan investasi infrastruktur, pengembangan kawasan ekonomi khusus, dan integrasi ekonomi regional (Riska, 2024). Namun demikian, kedekatan ekonomi yang berlebihan juga menghadirkan tantangan berupa potensi ketergantungan struktural yang dapat membatasi ruang gerak kebijakan luar negeri yang mandiri (Christin Sinaga, 2018).

Keputusan Prabowo Subianto untuk menerapkan strategi *hedging* dalam kebijakan luar negeri Indonesia tidak semata-mata didorong oleh dinamika eksternal, melainkan juga secara substansial dipengaruhi oleh konfigurasi domestik yang kompleks dan berlapis. Dalam konteks ini, kondisi makroekonomi nasional memegang peranan sentral, khususnya dalam kaitannya dengan arus investasi asing langsung, stabilitas moneter, dan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Dimensi-dimensi ekonomi ini tidak hanya memperkuat relasi struktural Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok sebagai mitra dagang dan sumber investasi utama dalam dua dekade terakhir (Tritto & Camba, 2022), melainkan juga memperjelas ketergantungan ekonomi yang secara paradoksal menciptakan peluang pembangunan sekaligus kerentanan terhadap tekanan hegemonik eksternal (Christin Sinaga, 2018).

Di sisi lain, struktur politik domestik turut mengonstruksi parameter strategis kebijakan luar negeri. Elit politik dan ekonomi, terutama yang berasal dari institusi militer, konglomerasi bisnis, dan partai-partai dominan, memainkan peranan signifikan dalam menavigasi relasi eksternal Indonesia. Militer, dengan kepentingannya terhadap isu kedaulatan teritorial dan keamanan nasional, cenderung mengadvokasi pendekatan realistis yang menyeimbangkan kepentingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok (Laksmana, 2021). Sementara itu, kepentingan kapitalistik dari kalangan pengusaha besar mendorong penguatan iklim investasi dan keterbukaan perdagangan luar negeri (Ing & Vadila, 2019) yang pada gilirannya menuntut posisi diplomatik Indonesia yang non-konfrontatif dan adaptif terhadap dinamika kekuatan global.

Aspek keamanan domestik juga merupakan variabel penting dalam formasi strategi *hedging* Indonesia. Tantangan keamanan kontemporer tidak lagi bersifat konvensional, melainkan semakin kompleks dan transnasional, mencakup ancaman terorisme, perdagangan manusia, serta kejahatan lintas batas negara (Reveron & Savage, 2020). Dalam menghadapi realitas ini, kolaborasi strategis dengan Amerika Serikat menjadi imperatif. Hubungan bilateral di sektor pertahanan dan keamanan melibatkan kerjasama dalam bidang pelatihan militer, pertukaran intelijen, serta peningkatan kapasitas institusi keamanan nasional (Laksmana, 2021).

Dalam aspek militer, kerjasama pertahanan antara kedua negara ini (Indonesia-Amerika Serikat) menjadi salah satu pilar utama yang terus diperkuat. Prabowo, dengan latar belakang militernya, melihat pentingnya modernisasi angkatan bersenjata untuk menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks. Super Garuda Shield 2025, misalnya, melanjutkan tradisi latihan militer bersama yang tidak hanya meningkatkan interoperabilitas, tetapi juga memperkuat komitmen bersama terhadap stabilitas regional di kawasan Indo-Pasifik (Chandra A.P, 2025). Selain itu, Indonesia meningkatkan anggaran pertahanannya dengan pembelian peralatan militer mutakhir dari Amerika Serikat, termasuk jet tempur F-15EX dan sistem

pertahanan udara yang bertujuan untuk memperkuat kekuatan udara dalam menghadapi ancaman regional serta menjadi upaya negosiasi dalam menghadapi tarif dari Amerika Serikat (*Indonesia percepat pembelian F-15 EX sebagai bahan negosiasi tarif dengan AS*, 2025).

Dalam merespon ancaman tarif AS sebesar 32%, pemerintah Indonesia turut mengirim delegasi tinggi ke Washington D.C. untuk berdiskusi langsung dengan pejabat AS, termasuk Menteri Perdagangan AS dan Duta Besar USTR. Negosiasi mencakup usulan peningkatan impor produk AS seperti LPG, kedelai, dan gandum hingga US$19 miliar, serta penawaran kemudahan investasi bagi perusahaan AS di Indonesia. Selain itu, Indonesia menekankan pentingnya hubungan "adil dan berimbang" dengan meminta tarif yang tidak lebih tinggi dari negara pesaing seperti Vietnam atau Kamboja (Suroyo & Sulaiman, 2025). Meski belum ada kesepakatan final, kedua pihak sepakat menyelesaikan kerangka negosiasi dalam 60 hari ke depan (Kamalina, 2025). Dalam mempercepat proses negosiasi tersebut, Prabowo Subianto mengupayakan pembentukan tiga satgas yang masing-masing memiliki tujuan yang berbeda. Satgas-satgas tersebut adalah Satgas Perundingan Perdagangan, Investasi, dan Keamanan Ekonomi, Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK, dan Satgas Deregulasi Kebijakan (Lavenia, 2025).

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah tertuang, penulis kemudian merumuskan masalah yang pada akhirnya akan dijawab dari penelitian ini. Pertanyaan yang dimaksud adalah mengapa ideologi dan prinsip Indonesia berpengaruh pada pengambilan *hedging strategy* atas Amerika Serikat dan Tiongkok pada kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia hingga pertengahan tahun 2026?

1.3. Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah bagaimana pada akhirnya penulis dan pembaca dapat mengetahui bahwa ideologi dan prinsip Indonesia berpengaruh pada pengambilan *hedging strategy* atas Amerika Serikat dan Tiongkok pada kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia hingga pertengahan tahun 2026.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mengisi celah dalam literatur hubungan internasional dengan memusatkan perhatian pada faktor domestik keyakinan ideologi dan prinsip yang memengaruhi keputusan suatu negara dalam menerapkan *hedging strategy*. Sebagian besar literatur sebelumnya cenderung lebih menekankan faktor-faktor eksternal seperti tekanan geopolitik atau ancaman keamanan dari persaingan antara negara-negara besar tanpa memperhitungkan secara mendalam pengaruh faktor domestik.

Tulisan ini memperkenalkan konsep "intermestic" (kombinasi dari *international* dan *domestic*), seperti yang dicetuskan oleh mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda (Latipulhayat & Dwi Harijanti, 2022), untuk menunjukkan bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia tidak dapat dipisahkan dari politik dalam negeri. Konsep ini menggarisbawahi bahwa keputusan-keputusan luar negeri tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan untuk merespon dinamika internasional tetapi juga oleh pertimbangan politik dan ekonomi domestik, seperti keinginan para politisi untuk mempertahankan popularitas dan dukungan publik.

Tulisan ini menekankan bahwa *hedging strategy* Indonesia bukanlah hasil dari tekanan geopolitik semata, melainkan juga respons terhadap perubahan agenda domestik dan internasional, menawarkan perspektif baru tentang bagaimana negara-negara yang lebih kecil dan menengah bisa lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian global. Bahwasannya *hedging strategy* bisa menjadi respons yang rasional bagi negara-negara yang lebih

lemah ketika mereka harus menyeimbangkan berbagai faktor risiko dan keuntungan dalam hubungan luar negeri mereka.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Review Literatur

Pada bagian ini menjelaskan terkait temuan-temuan penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai referensi untuk topik penelitian ini. Penelitian terdahulu telah dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga diharapkan mampu memudahkan peneliti dalam menjelaskan maupun memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian, mengingat penelitian ini mengangkat topik terkait dengan Peran Determinan Domestik dalam Pengambilan *Hedging Strategy* Indonesia atas Amerika Serikat dan Tiongkok pada Masa Kepemimpinan Prabowo Subianto.

Review literatur pertama (Sesarianto, 2023) mengkaji posisi Indonesia sebagai negara *middle power* dalam konteks politik Indo-Pasifik yang ditandai oleh persaingan pengaruh antara Amerika Serikat dan Cina. Dengan *strategi discursive hedging*, Indonesia berusaha menjaga posisi aman di tengah tekanan kekuatan besar tersebut. Hal ini tercermin dalam perannya melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), di mana Indonesia mempromosikan inklusivitas tanpa mensyaratkan nilai-nilai Barat seperti demokrasi dan hak asasi manusia. Pendekatan ini bertujuan untuk mengakomodasi Cina yang sebelumnya tersisih dalam narasi Indo-Pasifik lain seperti "Free and Open Indo-Pacific." Dalam analisisnya, Indonesia menggunakan konsep mimikri formal untuk menciptakan kesan inklusivitas di tingkat permukaan, dan mimikri substantif untuk memanfaatkan konflik kekuatan besar demi keuntungan ekonomi dan pengaruhnya di ASEAN. Meski AOIP diterima positif oleh Cina, khususnya dalam memperluas keterlibatan regional, strategi ini tidak

menyelesaikan konflik mendalam seperti ketegangan di Laut Cina Selatan, melainkan cenderung mempertahankan *status quo*. Pada akhirnya, artikel ini menilai bahwa meskipun strategi Indonesia terlihat inovatif dan inklusif, pendekatan ini serupa dengan strategi *hedging* negara *middle power* lainnya, seperti Australia dan Korea Selatan yang lebih berfokus pada kepentingan nasional daripada solusi substantif terhadap konflik regional.

Artikel kedua (Sulaiman et al., 2021) menjelaskan dampak rivalitas antara Amerika Serikat dan Cina terhadap stabilitas regional di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Rivalitas ini diperburuk oleh pandemi COVID-19 yang semakin memperlebar kesenjangan kepercayaan antara kedua kekuatan besar tersebut. Indonesia menghadapi tantangan besar untuk menjaga stabilitas regional sambil tetap menjalankan kebijakan luar negeri bebas-aktif. Di tengah meningkatnya pengaruh Cina melalui Belt and Road Initiative (BRI) dan investasi di kawasan, artikel ini menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi terhadap Cina tidak sepenuhnya dominan karena investasi dari negara lain seperti Jepang dan Uni Eropa tetap signifikan. Di sisi lain, ketegangan di Laut Cina Selatan menjadi ujian utama bagi diplomasi Indonesia, terutama terkait klaim sembilan garis putus-putus Cina yang mengancam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Untuk merespons situasi tersebut, Indonesia berupaya menjaga keseimbangan kekuasaan melalui diplomasi pragmatis, menerima bantuan medis dan ekonomi dari kedua pihak selama pandemi tanpa berpihak. Meski demikian, artikel ini mencatat bahwa dengan meningkatnya tekanan pasca-pandemi, Indonesia mungkin perlu mempertimbangkan strategi baru yang lebih tegas untuk melindungi kepentingan nasional dan stabilitas kawasan. Pendekatan ini mencerminkan upaya Indonesia dalam memainkan peran strategis di tengah dinamika geopolitik yang kompleks.

Review literatur ketiga (Mubah, 2019) membahas strategi *double hedging* Indonesia dalam menghadapi persaingan AS-Cina di Indo-Pasifik. Strategi ini menggabungkan pragmatisme ekonomi dengan Cina melalui integrasi visi Global Maritime Fulcrum (GMF) dengan Belt and Road Initiative (BRI) serta *limited bandwagoning* dengan AS untuk menjaga keterlibatan AS di kawasan. Dengan kebijakan bebas aktif dan ASEAN centrality, Indonesia berupaya menjaga stabilitas regional melalui konsep *dynamic equilibrium* dan *Indo-Pacific Cooperation Umbrella*. Meski mempererat hubungan ekonomi dengan Cina, Indonesia tetap mempertahankan keseimbangan melalui kemitraan strategis dengan AS untuk menghadapi tantangan seperti klaim Laut Cina Selatan. Strategi ini mencerminkan upaya Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan nasional dan berkontribusi pada stabilitas regional.

Dalam review literatur keempat (Rosyidin, 2017) menganalisis sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat pada tahun 2014, kebijakan luar negeri Indonesia mengalami perubahan mendasar yang mencerminkan penekanan pada prioritas domestik ketimbang keterlibatan global. Meskipun Jokowi menerapkan prinsip "diplomasi pro-rakyat" dan berpartisipasi dalam berbagai forum internasional, kebijakan luar negeri Indonesia cenderung mengabaikan dinamika geopolitik yang sedang berubah, terutama dalam konteks "Abad Asia" yang semakin mengemuka. Artikel ini menyoroti bahwa Indonesia, meskipun memiliki potensi untuk menjadi kekuatan besar ketiga di Asia setelah Cina dan India, tidak memanfaatkan kesempatan tersebut secara optimal. Jokowi lebih memfokuskan perhatian pada kepentingan material dan ekonomi domestik yang dianggap lebih penting daripada mengejar status internasional yang lebih tinggi. Dengan pendekatan ini, Indonesia terlihat sebagai "raksasa yang enggan", terjebak dalam pemikiran tradisional sebagai kekuatan menengah tanpa ambisi untuk bertransformasi menjadi kekuatan besar. Bahwasannya untuk mencapai

kepentingan nasional secara efektif, Indonesia perlu mengubah paradigma kebijakan luar negerinya dan memanfaatkan momentum Abad Asia untuk meningkatkan status globalnya.

Review literatur terakhir (Haacke, 2019) membahas konsep *hedging* dalam konteks hubungan internasional, khususnya di Asia Tenggara, di mana negara-negara kecil dan menengah menghadapi tantangan keamanan dari kekuatan besar seperti Cina dan Amerika Serikat. Dalam analisisnya, Haacke mengidentifikasi bahwa meskipun konsep *hedging* telah banyak dibahas, terdapat kebingungan dalam literatur mengenai definisi dan kriteria yang digunakan untuk menilai perilaku negara yang melakukan *hedging*. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam menentukan negara mana yang benar-benar menerapkan strategi ini. Untuk mengatasi masalah tersebut, Haacke mengusulkan kerangka konseptual dan metodologis yang dimodifikasi sehingga secara jelas membedakan *hedging* dari strategi keamanan lainnya seperti *balancing* (menyeimbangkan) dan *bandwagoning* (bergabung dengan kekuatan besar). Kerangka ini berfokus pada tiga kriteria utama: interpretasi tantangan keamanan oleh kepemimpinan politik, tindakan peningkatan kemampuan militer, dan ambiguitas sinyal mengenai keputusan aliansi.

Haacke kemudian menerapkan kerangka tersebut pada dua kasus di Asia Tenggara, yaitu Malaysia dan Singapura, untuk menunjukkan bagaimana pendekatan ini dapat digunakan secara sistematis untuk menganalisis perilaku hedging. Dalam artikel ini, Haacke juga mengkritik literatur yang ada tentang *hedging*, menunjukkan bahwa banyak penulis memiliki pandangan yang berbeda tentang negara mana yang sedang melakukan *hedging*, menciptakan kebingungan akademis. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk memperjelas dan memperkuat pemahaman tentang *hedging* sebagai strategi manajemen risiko dalam menghadapi tantangan keamanan dari kekuatan besar.

Analisis terhadap kelima literatur utama mengenai strategi kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks persaingan kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik mengungkapkan pola strategi *hedging* yang konsisten. Strategi ini mencerminkan upaya Indonesia untuk menyeimbangkan pengaruh eksternal dan mempertahankan otonomi strategisnya di tengah tekanan geopolitik yang semakin intensif. Secara keseluruhan, literatur ini menggambarkan Indonesia sebagai *middle power* yang secara aktif memanfaatkan strategi *hedging* untuk menjaga otonomi strategisnya, meskipun sering kali lebih berfokus pada stabilitas domestik dan keuntungan ekonomi jangka pendek daripada perubahan struktural dalam politik luar negeri. Ini mencerminkan karakteristik kebijakan luar negeri yang adaptif, tetapi tetap berhati-hati dalam memanfaatkan dinamika geopolitik global.

Penelitian ini yang berjudul Peran Determinan Domestik dalam Pengambilan Hedging Strategy Indonesia atas Amerika Serikat dan Tiongkok pada Masa Kepemimpinan Prabowo Subianto, memiliki kebaharuan dalam mengkaji pengaruh atau determinan domestik Indonesia dalam menghadapi persaingan kekuatan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Mengeksplorasi bagaimana Presiden Indonesia yang baru dilantik, Prabowo Subianto, menghadapi tantangan ini dengan strategi *hedging*-nya. Dengan meninjau kebijakan-kebijakan luar negeri yang dicanangkan, dapat menghasilkan kajian terkait sejauh mana pragmatisme Indonesia dengan politik bebas-aktifnya terhadap kedua adidaya ini.

1.5.2. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian terkait dengan peran determinan domestik keyakinan ideologi dan prinsip dalam pengambilan *hedging strategy* Indonesia atas Amerika serikat dan Tiongkok pada masa kepemimpinan Prabowo Subianto, penulis akan menggunakan sebuah teori sebagai kerangka pemikiran utama. Teori yang akan digunakan

untuk menganalisis peran dari determinan domestik proses pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia adalah teori *Neo-Classical Realism* yang ditulis oleh Gideon Rose pada tahun 1998 dalam jurnal yang berjudul Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy. Teori yang sudah dituliskan sebelumnya pada dasarnya dipilih oleh penulis untuk mendasari penelitian ini dikarenakan kedua hal tersebut cocok untuk diaplikasikan sehingga dianggap mampu untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Dalam teori *Neo-Classical Realism*, Gideon Rose menjelaskan bahwa tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara, pada dasarnya, dipengaruhi oleh berbagai determinan, antara lain determinan domestik dan determinan internasional (Rose, 1998). Berbeda dengan teori *Neo-Realism* pada umumnya yang beranggapan bahwa tindakan suatu negara selalu didasari atau dipengaruhi oleh sistem internasional yang bersifat anarki atau yang dapat disebut sebagai pendekatan *outside-in*, *Neo-Classical Realism* memiliki pendekatan yang lebih bersifat dari dalam ke luar atau *inside-out* (Hadiwinata, 2017). Alasan utama yang mendasari pendekatan *inside-out* tersebut adalah anggapan bahwa di dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara, bukan hanya determinan internasional yang kemudian harus diperhitungkan oleh para pembuat kebijakan, melainkan ada determinan domestik yang secara langsung mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dari dalam negara. Oleh karena itu, untuk menganalisis kebijakan luar negeri yang dibuat oleh suatu negara, selain berfokus untuk menjelaskan determinan-determinan internasional yang berasal dari luar negara, teori *Neo-Classical Realism* juga menjelaskan pentingnya determinan-determinan domestik yang ada di dalam negeri, atau yang disebut juga sebagai *Innenpolitik* (Rose, 1998).

Beberapa determinan domestik yang merupakan bagian dari *Innenpolitik* yang dibahas oleh teori *Neo-Classical Realism* antara lain

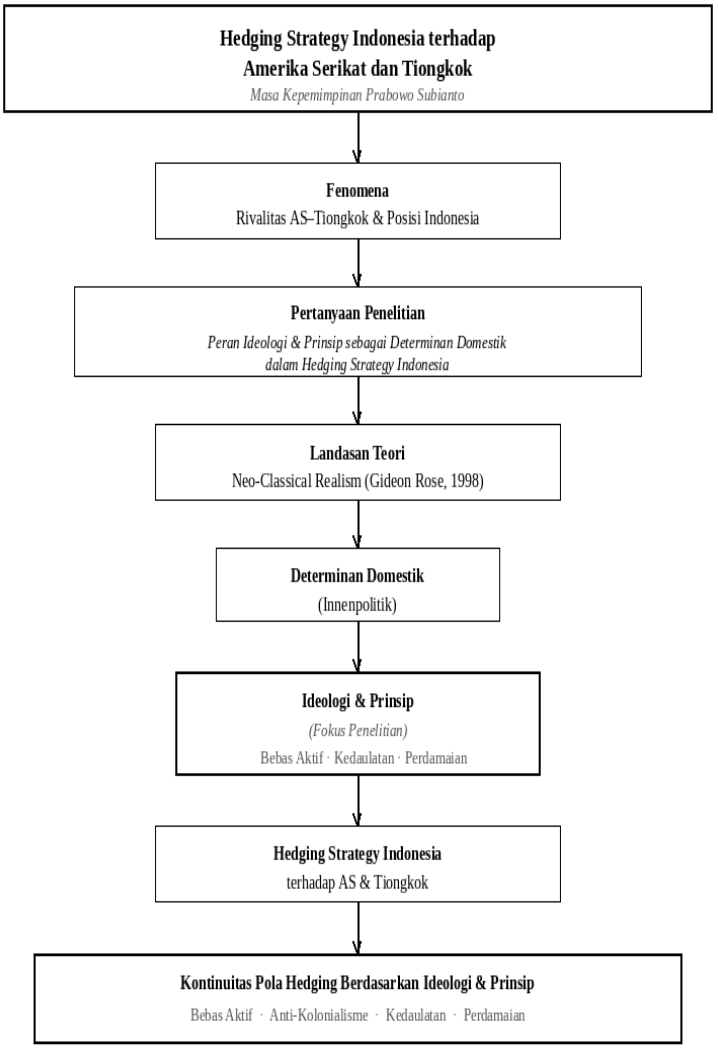
terdiri dari keyakinan ideologis, preferensi elit politik, persepsi ancaman, opini publik, dan juga kekuatan relatif atau *relative power* (Devlen & Özdamar, 2009). Hal-hal yang akan dibahas dalam determinan ideologi dan prinsip sendiri adalah bagaimana ideologi dan prinsip yang dianut oleh sebuah negara dan masyarakat di dalamnya mempengaruhi cara pandang nasional dan juga kebijakan yang dibuat oleh negara tersebut. Selanjutnya, determinan preferensi elit politik menggarisbawahi bagaimana opini, pengalaman, dan kepentingan elit-elit politik seperti kementerian yang ada di dalam suatu negara dapat memengaruhi proses pembuatan kebijakan negara tersebut. Setelah itu, dalam determinan persepsi ancaman berfokus mengenai bagaimana kekuatan militer dan kesamaan identitas dapat mempengaruhi persepsi ancaman yang dibuat oleh negara terkait suatu isu. Selanjutnya, determinan opini publik menjelaskan mengenai bagaimana tekanan domestik dari masyarakat dalam bentuk opini publik dapat mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang sesuai dan dapat memenuhi kepentingan masyarakat publik di negaranya. Terakhir, pada determinan kekuatan relatif menjelaskan bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia dapat direalisasi oleh pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di dalam latar belakang, penelitian ini berfokus pada pengambilan *hedging strategy* yang didorong hal domestik mengenai keyakinan ideologi dan prinsip Indonesia. Ideologi dan prinsip negara berfungsi sebagai fondasi normatif yang relatif stabil dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Prinsip politik luar negeri bebas aktif, anti-kolonialisme, penghormatan terhadap kedaulatan, serta komitmen terhadap perdamaian internasional telah dilembagakan lintas rezim dan membentuk preferensi strategis Indonesia. Dalam konteks *hedging strategy*, fondasi normatif ini memberikan kerangka penjelas yang lebih konsisten dibanding determinan domestik yang bersifat kontingen dan

situasional. Selain itu, ideologi dan prinsip memiliki daya jelaskan jangka panjang yang melampaui fluktuasi kepentingan ekonomi sektoral, tekanan kelompok kepentingan, maupun perubahan konfigurasi politik domestik. Sebagai *guiding values*, ideologi memungkinkan penjelasan atas kontinuitas pola *hedging* Indonesia meskipun terjadi perubahan prioritas nasional.

Gambar 1.1.

Kerangka Berpikir Penelitian



Gambar 1.1. yang menyertai tulisan ini menggambarkan kerangka berpikir dari penelitian ini, dengan menyoroti interaksi dinamis antara tekanan eksternal sistem internasional yang ditunjukkan oleh rivalitas strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok dan posisi Indonesia sebagai variabel *intervening* di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Dalam kerangka ini, *Neo-Classical Realism* memberikan lensa analisis yang komprehensif untuk mengkaji bagaimana determinan domestik memediasi rangsangan eksternal dan membentuk perilaku kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya dalam mengadopsi strategi *hedging*. Strategi *hedging* ini, sebagai bentuk orientasi kebijakan luar negeri yang kompleks, muncul dari interaksi antara tekanan kompetitif internasional dan lanskap politik domestik Indonesia. Keyakinan ideologis dianalisis secara seksama untuk mengetahui kontribusinya dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Hasil dari pertemuan determinan ini termanifestasi dalam strategi *hedging* yang berupaya menyeimbangkan antara keterlibatan aktif dan kehati-hatian terhadap kedua kekuatan besar. Dengan demikian, model analitis ini menegaskan klaim utama bahwa respons kebijakan luar negeri Indonesia terhadap kontestasi strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak semata-mata reaktif terhadap sistem internasional, tetapi juga dimediasi secara krusial oleh faktor-faktor politik dan institusional dalam negeri. Oleh karena itu, *Neo-Classical Realism* menjadi fondasi teoritis yang paling relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang diajukan dalam tulisan ini.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konsep

1.6.1.1. *Hedging*

Hedging merupakan konsep multidimensional dalam kajian hubungan internasional yang mengacu pada serangkaian

strategi kompleks yang dijalankan oleh negara-negara dalam merespons ketidakpastian sistem internasional serta dinamika distribusi kekuasaan. Strategi ini ditandai dengan upaya negara untuk menjaga fleksibilitas kebijakan luar negeri dengan tidak secara eksplisit terikat pada pendekatan penyeimbangan (*balancing*) terhadap kekuatan besar, maupun sepenuhnya menyelaraskan diri dengan kekuatan hegemonik (*bandwagoning*). Dalam konteks ini, *hedging* mencerminkan kalkulasi strategis yang bersifat ambivalen, hal ini memungkinkan negara untuk meminimalkan risiko serta memaksimalkan manfaat dalam tatanan internasional yang bersifat fluktuatif dan tidak pasti.

Cheng-Cwee Kuik dalam Getting Hedging Right: a Small-State Perspective 2021 menyebutkan bahwa dalam kerangka hubungan internasional, *hedging* dipahami sebagai *insurance-seeking behavior*, yaitu strategi pencarian perlindungan oleh negara dalam kondisi yang ditandai oleh ketidakpastian sistemik dan potensi risiko tinggi, di mana negara bertindak secara rasional dengan menghindari komitmen eksklusif terhadap salah satu kekuatan besar. Alih-alih menunjukkan keberpihakan yang eksplisit, negara menjalankan kebijakan ganda, baik dalam bentuk kerja sama maupun penyeimbangan terbatas terhadap aktor-aktor besar yang saling bersaing, guna mempertahankan posisi strategis yang fleksibel sebagai bentuk mitigasi risiko (Kuik, 2021).

Brock Tessman dan Wojtek Wolfe dalam Great powers and Strategic Hedging: The Case of Chinese Energy Security Strategy 2011 menyampaikan bahwa *hedging* merepresentasikan perluasan konseptual dari logika teori keseimbangan kekuasaan tradisional, dengan mengakomodasi spektrum perilaku kebijakan luar negeri yang lebih kompleks

dan beragam. Strategi ini menekankan pentingnya insentif struktural dalam konteks sistem internasional *unipolar* yang tengah mengalami proses dekonsentrasi kekuasaan, di mana dominasi hegemon mulai mengalami erosi relatif. Dalam kerangka ini, *hedging* berfungsi sebagai instrumen strategis yang memungkinkan negara-negara kelas menengah untuk menghindari konfrontasi langsung dengan kekuatan besar, sambil secara simultan memperkuat kapasitas ketahanan strategis jangka panjang mereka. Pendekatan ini mencerminkan perhitungan rasional negara dalam mempertahankan otonomi dan relevansi geopolitik di tengah dinamika tatanan global yang semakin cair dan tidak menentu (Tessman & Wolfe, 2011).

Senem Aydın-Düzgit, Mustafa Kutlay, dan E. Fuat Keyman dalam Strategic Autonomy in Turkish Foreign Policy in an Age Multipolarity: Lineages and Contradictions of an Idea 2025 menyampaikan bahwa *hedging* memiliki keterkaitan yang inheren dengan konsep otonomi strategis, hal ini merujuk pada upaya negara untuk mengamankan ruang kebijakan luar negeri yang independen dari dominasi aliansi tradisional. Dalam konteks ini, negara-negara secara aktif mengembangkan jejaring hubungan bilateral dan multilateral alternatif sebagai sarana diversifikasi kemitraan strategis, sekaligus mempertahankan fleksibilitas manuver diplomatik mereka. Pendekatan ini memungkinkan negara untuk menavigasi dinamika geopolitik yang kompleks dan tidak menentu, tanpa harus terikat secara kaku pada komitmen aliansi yang dapat membatasi otonomi tindakan mereka dalam menghadapi perubahan konstelasi kekuasaan global (Aydın-Düzgit et al., 2025).

1.6.1.2. Ideologi Negara

Ideologi negara merupakan konsep kunci dalam analisis politik dan hubungan antara negara dan masyarakat yang merujuk pada seperangkat keyakinan, nilai, dan norma yang terintegrasi secara sistematis serta dilembagakan sebagai fondasi normatif dan sumber legitimasi bagi tatanan politik, hukum, dan kultural suatu negara. Dalam kerangka ini, ideologi negara tidak dipahami semata-mata sebagai konstruksi ideasional, melainkan sebagai struktur makna yang secara aktif membingkai orientasi kekuasaan, menentukan batas-batas tindakan negara, serta mengarahkan formulasi dan implementasi kebijakan publik (Danilyan et al., 2025).

Berdasarkan artikel Petr Kokaisl dalam jurnal Historická Sociologie (2022), ideologi negara dikonsepsikan sebagai konfigurasi gagasan, norma, dan prinsip yang terinstitusionalisasi dalam struktur negara guna membentuk, mengarahkan, sekaligus melegitimasi tatanan sosial-politik serta konstruksi identitas kolektif masyarakat. Dalam konteks Uni Soviet, ideologi negara tidak semata berfungsi sebagai perangkat normatif, melainkan beroperasi sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) yang secara sistematis diarahkan untuk mentransformasikan masyarakat sesuai dengan teleologi komunisme. Melalui kerangka ini, negara diposisikan sebagai subjek historis yang memiliki otoritas epistemik dan administratif untuk mendefinisikan, mengonstruksi, bahkan mereifikasi kategori-kategori etnis dan nasional melalui intervensi kebijakan di bidang administrasi, pendidikan, bahasa, dan produksi statistik resmi.

Dalam artikel "Pancasila as the Ideology of the State and Nation" (Wirasena et al., 2023), ideologi negara dijelaskan

sebagai sistem nilai dasar yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi tidak hanya dipahami sebagai kumpulan gagasan, tetapi sebagai dasar pemikiran yang memberi arah bagi negara dalam mencapai tujuan nasional yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Dengan kata lain, ideologi negara berfungsi sebagai kerangka acuan utama yang memengaruhi cara negara menyusun kebijakan, membentuk peraturan, serta menentukan prioritas pembangunan nasional. Melalui ideologi, negara memiliki standar nilai yang jelas untuk menilai apakah suatu kebijakan sejalan dengan cita-cita bangsa atau justru menyimpang dari tujuan yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, ideologi tidak bersifat abstrak semata, melainkan memiliki implikasi konkret dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat sehari-hari.

1.6.1.3. Kebijakan Luar Negeri

kebijakan luar negeri menurut Jean-Frédéric Morin & Jonathan Paquin (2018) adalah seperangkat tindakan atau aturan yang mengatur tindakan suatu otoritas politik yang independen dan beroperasi dalam lingkungan internasional, oleh karena itu, hanya negara berdaulat yang secara tepat dapat dikatakan memiliki kebijakan luar negeri. Konsep ini secara inheren bersifat polisemik. Ia dapat merujuk pada tindakan konkret, reaksi, atau bahkan ketidakbertindakan yang disengaja oleh suatu negara dalam konteks internasional, baik bersifat *ad hoc* maupun berpola dalam jangka waktu tertentu, atau pada visi atau doktrin yang lebih abstrak mengenai posisi negara di dunia, kepentingan nasionalnya, serta prinsip-prinsip yang menstrukturkan perilaku eksternalnya.

Dalam artikel Olubukola S. Adesina (2017) berjudul "Foreign Policy in an Era of Digital Diplomacy", kebijakan luar negeri diartikan sebagai suatu konstruksi yang terdiri atas dua komponen utama: tujuan nasional (*national objectives*) yang ingin dicapai oleh suatu negara, serta instrumen atau sarana yang digunakan untuk merealisasikan tujuan tersebut. Dengan demikian, kebijakan luar negeri dipahami sebagai hasil interaksi strategis antara kepentingan nasional dan kapasitas sumber daya yang tersedia. Relasi antara tujuan dan sarana ini menjadi inti dari praktik kenegaraan (*statecraft*) karena efektivitas kebijakan luar negeri sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam menyelaraskan ambisi politiknya dengan kemampuan material maupun nonmaterial yang dimilikinya.

Berdasarkan artikel Christopher Hill berjudul "What is to be done? Foreign Policy as a Site for Political Action" (2003), secara konseptual, Hill mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai bentuk "*collective coping with the international environment*", yaitu cara kolektif suatu komunitas politik, terutama negara, dalam menghadapi, menengahi, dan merespons lingkungan internasionalnya. Definisi ini menekankan dimensi kolektif (bukan individual), sifat politis (melibatkan pilihan dan prioritas), serta hubungan erat antara dimensi domestik dan eksternal. Kebijakan luar negeri tidak hanya menyangkut diplomasi formal, melainkan keseluruhan aktivitas resmi pemerintah yang bertujuan mengelola interaksi antara "*inside*" dan "*outside*" dalam suatu sistem internasional yang kompleks.

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. *Hedging*

Berdasarkan artikel *"The Concept of Hedging and Its Application to Southeast Asia"* oleh Jürgen Haacke (2019), terdapat tiga indikator utama dalam penggunaan konsep hedging yang ia ajukan untuk membedakan strategi *hedging* dari strategi keamanan lain seperti *balancing* dan *bandwagoning*. Indikator-indikator tersebut adalah:

1. Konstruksi Diskursif terhadap Tantangan Keamanan

   Haacke menyoroti pentingnya konstruksi diskursif *elite* politik terhadap tantangan keamanan yang dihadapi negara. Wacana resmi pemerintah, seperti yang tercermin dalam dokumen pertahanan, pidato kenegaraan, atau pernyataan diplomatik, menjadi indikator kunci untuk menilai apakah suatu negara memaknai kebangkitan kekuatan besar (seperti Tiongkok) sebagai ancaman eksplisit (*threat*) atau risiko potensial (*risk*).

   Dalam kerangka ini, strategi hedging dipahami sebagai respons preventif dan kontinjensi terhadap ketidakpastian strategis, bukan sebagai reaksi langsung terhadap ancaman yang sudah nyata dan terdefinisi. Oleh karena itu, dimensi interpretatif dari para pembuat kebijakan terhadap isu-isu keamanan menjadi sentral dalam membedakan *hedging* dari strategi *balancing* konvensional.

2. Peningkatan Kapabilitas Militer secara Selektif

   Indikator kedua merujuk pada langkah-langkah peningkatan kapabilitas militer (*military capabilities enhancement*), baik internal maupun eksternal. Dalam konteks *hedging*, penguatan militer bersifat terbatas,

selektif, dan non-konfrontatif. Tujuan utamanya adalah memperkuat kesiapsiagaan serta kapabilitas pertahanan terhadap kontingensi masa depan yang belum pasti.

Bentuk konkret dari strategi ini mencakup latihan militer berskala terbatas, pengembangan sistem pengawasan, dan akuisisi teknologi pertahanan yang bersifat defensif. Sebaliknya, strategi *balancing* dicirikan oleh intensifikasi kerja sama militer formal dan peningkatan kemampuan ofensif sebagai respons terhadap ancaman yang telah diidentifikasi secara eksplisit.

3. Ambiguitas Strategis dalam Sinyal Aliansi

Indikator ketiga berkaitan dengan sejauh mana suatu negara mempertahankan ambiguitas dalam sinyal politik terkait orientasi aliansi terhadap kekuatan besar. Negara yang menerapkan strategi *hedging* secara sadar menghindari keterikatan formal dengan blok kekuatan tertentu guna menjaga fleksibilitas dan otonomi strategis.

Apabila suatu negara secara eksplisit menunjukkan komitmen politik dan militer yang eksklusif terhadap satu kekuatan besar, termasuk dengan membentuk perjanjian pertahanan yang bersifat mengikat, maka strategi tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai *balancing* atau *bandwagoning*. Dengan demikian, tingkat ambiguitas dalam sinyal aliansi menjadi indikator penting dalam membedakan *hedging* dari strategi lainnya.

Berdasarkan indikator-indikator di atas, penyikapan yang diambil Indonesia di era kepemimpinan Prabowo Subianto selaras dengan operasionalisasi dari strategi *hedging* yang berikutnya dapat diamati dari penyikapan Indonesia dalam menjalin kerja sama secara beriringan baik kepada Amerika Serikat dan Tiongkok. Indonesia secara konsisten menolak

untuk bergabung dalam aliansi militer formal apa pun. Kemitraan strategis komprehensif dengan AS dan Tiongkok dikembangkan secara paralel tanpa memberikan akses pangkalan militer atau komitmen pertahanan kolektif kepada salah satu pihak.

1.6.2.2. Ideologi Negara

Berdasarkan kerangka konseptual yang dirumuskan dalam tulisan "Modern Understanding of the Concept of 'State Ideology': Philosophical and Legal Reflection" oleh Danilyan, Dzeban, Kalynovskyi, dan Krotiuk (2025), ideologi negara dapat diidentifikasi melalui seperangkat indikator yang bersifat esensial, konstitutif, dan saling berkelindan. Indikator-indikator membentuk suatu totalitas sistemik yang koheren. Totalitas inilah yang membedakan ideologi negara dari sekadar agregasi gagasan, preferensi politik, atau orientasi kebijakan yang bersifat temporer, serta menggunakannya sebagai konstruksi normatif yang memiliki daya mengikat dan keberlanjutan historis.

1. Spiritual dan Nilai

   Pertama, ideologi negara berlandaskan dimensi spiritual dan nilai (*spiritual and value-based foundation*). Dalam tulisan tersebut ditegaskan bahwa ideologi negara tidak dapat direduksi menjadi instrumen politik yang pragmatis atau teknokratis semata. Sebaliknya, ia dipahami sebagai fenomena spiritual dan aksiologis yang berakar pada pengalaman historis, tradisi kultural, dan struktur mental kolektif suatu bangsa. Dengan demikian, ideologi negara harus bertumpu pada nilai-nilai fundamental yang diinternalisasi dalam kesadaran sosial dan diwariskan lintas generasi. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai horizon

makna yang memberikan orientasi normatif, legitimasi etis, serta arah teleologis bagi praktik kehidupan bernegara.

2. Ide Nasional

   Ideologi negara merupakan artikulasi konseptual dari ide nasional (*national idea*). Ideologi negara diposisikan sebagai medium yang merepresentasikan ide nasional sebagai ekspresi kesadaran diri bangsa atas posisinya sebagai subjek sejarah. Ide nasional berfungsi sebagai inti normatif yang menyatukan aspirasi kolektif, imajinasi politik, dan orientasi masa depan bangsa. Melalui ideologi negara, ide nasional diterjemahkan secara sistematis ke dalam ranah politik, hukum, sosial, budaya, dan simbolik, sehingga tidak berhenti pada tataran abstraksi normatif, tetapi memperoleh bentuk institusional dan praksis dalam penyelenggaraan negara.

3. Kepentingan Nasional

   Ideologi negara berorientasi secara inheren pada kepentingan nasional (*national interests*). Tulisan tersebut menegaskan bahwa ideologi negara berfungsi sebagai kerangka interpretatif dan normatif untuk merumuskan, mengartikulasikan, serta melindungi kepentingan nasional. Kepentingan nasional dipahami sebagai inti dari identitas kolektif, keberlanjutan historis, dan keamanan eksistensial bangsa. Dalam kerangka ini, ideologi negara berperan sebagai instrumen normatif yang mengarahkan tindakan negara sekaligus menjadi mekanisme korektif terhadap potensi deviasi kebijakan dan praktik kekuasaan dari tujuan-tujuan fundamental bangsa, baik dalam perspektif jangka pendek maupun jangka panjang.

4. Fungsi Integratif dan Konsolidatif

Ideologi negara memiliki fungsi integratif dan konsolidatif. Salah satu indikator utama ideologi negara terletak pada kapasitasnya untuk mengintegrasikan keragaman sosial, kepentingan politik, dan identitas kultural ke dalam satu kerangka nilai bersama. Ideologi negara berfungsi sebagai matriks pemersatu yang memperkuat solidaritas sosial, mengkonstruksi identitas nasional, dan menegaskan kesadaran kolektif sebagai satu komunitas politik. Fungsi ini memperoleh signifikansi khusus dalam konteks krisis, konflik, atau fragmentasi sosial, ketika ideologi negara berperan sebagai mekanisme kohesi yang menopang stabilitas dan ketahanan nasional.

5. Non-Partisan

   Ideologi negara bersifat non-partisan dan tidak dapat diprivatisasi oleh aktor politik tertentu. Dalam tulisan ditegaskan bahwa ideologi negara tidak identik dengan ideologi politik klasik maupun kepentingan satu partai atau kelompok tertentu. Ideologi negara merupakan kerangka nilai bersama yang bersifat inklusif dan terbuka, yang memungkinkan kontribusi dari seluruh aktor negara dan masyarakat. Ia berkembang melalui praktik konsensus, dialog publik, dan interaksi berkelanjutan antara negara dan masyarakat sipil, tanpa kehilangan karakter dasarnya sebagai orientasi normatif nasional.

6. Legitimasi Kekuasaan

   Ideologi negara berfungsi sebagai basis legitimasi kekuasaan dan kebijakan publik. Ideologi negara menyediakan landasan moral, politik, dan hukum bagi keberadaan negara sebagai institusi, bagi arah kebijakan yang ditempuh, serta bagi keputusan politik yang dihasilkan. Melalui fungsi legitimatif ini, ideologi negara

berkontribusi pada pembentukan dan pemeliharaan kepercayaan warga negara terhadap institusi negara, sekaligus memastikan bahwa proyek pembangunan nasional memperoleh justifikasi normatif dalam kesadaran publik.

7. Medium Komunikasi Politik

   Ideologi negara memiliki dimensi komunikatif dan diskursif yang esensial. Tulisan tersebut menempatkan ideologi negara sebagai produk mental dan komunikatif masyarakat yang membentuk kerangka wacana bersama dalam ruang publik. Ideologi negara menyediakan bahasa simbolik, norma interpretatif, dan kategori makna yang memungkinkan berlangsungnya komunikasi politik. Melalui dimensi ini, kebijakan negara dapat diproduksi, dijustifikasi, diperdebatkan, serta dievaluasi secara rasional dan partisipatif, sehingga ideologi negara berfungsi sebagai prasyarat diskursif bagi praktik demokrasi yang substantif.

8. Stabil

   Ideologi negara memiliki karakter relatif stabil namun adaptif terhadap perubahan. Ideologi negara ditopang oleh kerangka nilai yang bersifat relatif permanen sebagai fondasi jangka panjang, namun pada saat yang sama bersifat fleksibel, terbuka, dan pluralistik dalam merespons dinamika internal dan eksternal. Karakter ini memungkinkan ideologi negara mempertahankan relevansinya dalam menghadapi perubahan sosial, politik, dan global, tanpa kehilangan inti nilai yang bersifat konstitutif bagi identitas dan keberlanjutan negara.

Berdasarkan indikator ideologi negara yang telah dirumuskan, Pancasila dapat dipahami secara konseptual dan normatif sebagai ideologi negara Indonesia. Pancasila berakar pada dimensi spiritual dan aksiologis yang terinternalisasi

dalam pengalaman historis serta kebudayaan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai artikulasi ide nasional dan kepentingan nasional dalam kerangka ketatanegaraan. Melalui fungsi integratif, non-partisan, dan legitimatif, Pancasila berperan mempersatukan keberagaman sosial-politik, mengarahkan orientasi kebijakan publik, serta menyediakan kerangka nilai normatif bagi praktik demokrasi. Karakter Pancasila yang relatif stabil namun terbuka terhadap penafsiran kontekstual memastikan keberlanjutan relevansinya dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

1.6.2.3. Kebijakan Luar Negeri

Dalam penelitian ini, kebijakan luar negeri dikonseptualisasikan sebagai hasil dari pilihan strategis negara yang bersifat sadar dalam merespons lingkungan internasional. Konseptualisasi ini diturunkan secara langsung dari kerangka neoklasik realisme sebagaimana dirumuskan oleh Gustav Meibauer (2020) yang memandang kebijakan luar negeri sebagai *outcome* dari interaksi kausal antara tekanan sistemik pada tingkat internasional dan proses pengambilan keputusan yang berlangsung di tingkat domestik. Dengan demikian, kebijakan luar negeri tidak dipahami sebagai refleksi otomatis dari struktur internasional, melainkan sebagai produk dari proses interpretatif, deliberatif, dan selektif yang dilakukan oleh aktor-aktor negara. Berdasarkan pemahaman tersebut, kebijakan luar negeri dioperasionalisasikan melalui indikator-indikator berikut.

1. Respons terhadap Lingkungan Internasional

   Kebijakan luar negeri tercermin dalam cara negara merespons lingkungan internasional yang bersifat eksternal. Respons ini berhubungan langsung dengan

insentif dan tekanan sistemik yang dihasilkan oleh struktur internasional, termasuk distribusi kapabilitas material antarnegara. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri merepresentasikan upaya negara untuk menafsirkan, mengantisipasi, dan merespons peluang serta ancaman yang muncul dari konfigurasi sistem internasional yang dinamis.

2. *Foreign Policy Choice*

   Kebijakan luar negeri ditandai oleh keberadaan proses pengambilan keputusan yang bersifat sadar dan non-otomatis (*foreign policy choice*). Hal ini menegaskan bahwa kebijakan luar negeri merupakan hasil dari pilihan strategis yang dibuat oleh pengambil keputusan negara, bukan konsekuensi mekanis dari tekanan struktural semata. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap berbagai alternatif tindakan, pertimbangan atas konsekuensi yang mungkin timbul, serta penilaian terhadap kesesuaian tindakan dengan kepentingan nasional.

3. Mediasi *Unit-Level* dalam Pengambilan Keputusan

   Kebijakan luar negeri dimediasi oleh faktor-faktor pada tingkat unit (*unit-level*), khususnya melalui proses deliberasi di antara elite pengambil keputusan. Dalam kerangka neoklasik realisme, proses ini berfungsi sebagai *transmission belt* yang menerjemahkan tekanan dan kepentingan yang bersumber dari sistem internasional ke dalam keputusan dan tindakan negara. Dengan demikian, kebijakan luar negeri lahir dari mekanisme internal yang menghubungkan struktur eksternal dengan agensi aktor negara.

4. Kepentingan Nasional Berbasis Realitas Material

Kebijakan luar negeri memiliki keterkaitan kausal dengan kepentingan nasional yang diturunkan dari realitas material. Kepentingan ini mencakup isu-isu fundamental seperti keamanan negara, kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan posisi relatif negara dalam sistem internasional. Dalam argumen Meibauer, kepentingan material tersebut diposisikan sebagai variabel independen utama yang secara temporal dan kausal mendahului perumusan serta pemilihan kebijakan luar negeri.

5. Ide sebagai Variabel Intervening

   Dalam proses perumusan kebijakan luar negeri, ide berfungsi sebagai variabel *intervening* yang menjembatani kepentingan material dan tindakan negara. Ide dipahami sebagai seperangkat keyakinan individual para pengambil keputusan yang dieksternalisasikan ke dalam arena deliberasi politik. Melalui ide-ide inilah kondisi sistemik ditafsirkan, kepentingan nasional diberi makna, dan berbagai alternatif kebijakan diperdebatkan sebelum keputusan akhir diambil.

6. Kompetisi Ide dalam Proses Perumusan Kebijakan

   Kebijakan luar negeri terbentuk melalui kompetisi ide yang berlangsung dalam proses pengambilan keputusan. Perbedaan keyakinan, persepsi, dan interpretasi di antara elite pengambil keputusan menghasilkan pertarungan ide mengenai arah, bentuk, dan intensitas respons negara terhadap lingkungan internasional. Kebijakan luar negeri pada akhirnya merefleksikan ide atau konfigurasi ide yang berhasil mencapai dominasi dalam proses deliberatif tersebut.

7. Keterlacakan Empiris Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri bersifat dapat ditelusuri secara empiris melalui ekspresi ide dalam bahasa dan komunikasi politik. Hal ini mencakup pidato resmi, dokumen kebijakan, pernyataan negara, serta bentuk komunikasi politik lainnya yang merepresentasikan justifikasi, rasionalisasi, dan *framing* kebijakan. Dengan demikian, kebijakan luar negeri tidak hanya dapat dianalisis secara konseptual, tetapi juga dapat diuji secara empiris melalui penelusuran bukti diskursif.

8. Hubungan Kausal Sistemik dan Tindakan Negara

   Kebijakan luar negeri mempertahankan hubungan kausal yang jelas antara stimulus sistemik, variabel *intervening* pada tingkat domestik, dan tindakan negara. Hubungan kausal ini disusun sesuai dengan komitmen terhadap kausalitas Humean dalam kerangka neoklasik realisme, di mana kebijakan luar negeri dipahami sebagai akibat dari rangkaian sebab-akibat yang tersusun secara temporal, logis, dan dapat ditelusuri secara analitis.

Di tengah rivalitas strategis kedua kekuatan tersebut, Indonesia menghadapi tekanan sistemik yang mendorong pilihan kebijakan luar negeri yang tidak bersifat biner. Pilihan *hedging* dipahami sebagai *foreign policy choice* yang sadar dan deliberatif, dimediasi oleh proses pengambilan keputusan di tingkat unit, di mana ideologi dan prinsip politik luar negeri berfungsi sebagai variabel *intervening* dalam menafsirkan kepentingan nasional dan menentukan respons negara. Dengan demikian, kebijakan luar negeri Indonesia dapat dipahami sebagai hasil hubungan kausal antara struktur internasional, determinan domestik ideologis, dan tindakan negara.

1.7. Argumen Penelitian

Sikap atau pengambilan keputusan Indonesia di bawah Kabinet Merah Putih yang dinahkodai oleh Prabowo Subianto telah banyak berpengaruh pada arah kebijakan luar negeri Indonesia. Tentunya hal ini didasari pada interpretasi politik bebas-aktifnya yang dijadikan prinsip Indonesia dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negerinya. Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok dan Amerika Serikat dapat dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan hubungan dengan dua kekuatan besar dalam kerangka politik luar negeri bebas-aktif. Indonesia secara simultan melanjutkan penguatan kerja sama ekonomi dan investasi dengan Tiongkok, sekaligus mempertahankan hubungan strategis serta komunikasi diplomatik dengan Amerika Serikat, tanpa menunjukkan keberpihakan eksplisit dalam rivalitas global yang berkembang. Pendekatan ini mencerminkan pola diplomasi yang rasional dan pragmatis, di mana keterlibatan aktif dengan kedua negara dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan strategis sekaligus membatasi potensi tekanan geopolitik. Dalam konteks tersebut, strategi ini dapat dipahami sebagai bentuk *hedging* yang bersifat praktis, bertujuan menjaga kepentingan nasional, stabilitas kawasan, dan otonomi kebijakan luar negeri Indonesia. Seluruh pola ini tetap konsisten dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan perdamaian dan kerja sama internasional, serta prinsip bebas-aktif yang menempatkan Indonesia sebagai aktor yang berperan aktif dalam tatanan global.

1.8. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan untuk meneliti topik yang dipilih adalah metode kualitatif berupa studi kasus. Pada dasarnya, metode kualitatif studi kasus merupakan sebuah pendekatan yang berguna untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari strategi *hedging* di dalam pengambilan keputusan atau kebijakan luar negeri suatu negara. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif ditandai dengan

tujuannya untuk mencari pemahaman terkait dengan aspek-aspek yang ada di kehidupan sosial yang pada umumnya menghasilkan data yang berupa kata-kata untuk kemudian dianalisis. Mengacu pada pemikiran Gomm, Hamersley, dan Foster, metode kualitatif studi kasus sendiri ditujukan untuk memenangkan keunikan dari keunikan dari kasus yang menjadi fokus penelitian di mana pada penelitian ini, kasus yang diteliti strategi *hedging* Indonesia di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan eksplanatif yang bertujuan untuk mengungkap dinamika di balik suatu fenomena tertentu secara mendalam. Penelitian eksplanatif merupakan suatu pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk memahami akar penyebab serta hubungan kausal di balik suatu fenomena yang belum banyak terjelajahi (Yüce, 2024). Fokus utama dari jenis penelitian ini terletak pada upaya merumuskan hubungan sebab-akibat antarvariabel guna menjelaskan fenomena sosial secara lebih mendalam, melampaui sekadar observasi deskriptif. Penelitian ini menekankan pengujian teori baru serta penyusunan model kausalitas yang dapat menjelaskan mekanisme fundamental yang melatarbelakangi perilaku dan peristiwa. Dalam implementasinya, penelitian eksplanatif memanfaatkan beragam metodologi seperti teknik statistik, eksperimen, survei, hingga wawancara mendalam guna memvalidasi hipotesis yang diajukan serta memproyeksikan kemungkinan kejadian di masa mendatang. Melalui kerangka eksplanatif ini, penelitian diarahkan untuk mengelaborasi bagaimana strategi *hedging* yang berangkat dari determinan domestik, diimplementasikan sebagai instrumen kebijakan luar negeri dalam upaya Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo Subianto mempertahankan keseimbangan hubungan strategisnya dengan dua kekuatan besar dunia, yakni Amerika Serikat dan Tiongkok.

1.8.2. Situs Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan melalui metode *desk research*, yakni suatu pendekatan kajian kepustakaan yang dilakukan tanpa keterlibatan langsung di lapangan. Seluruh proses pengumpulan dan analisis data akan dilakukan dari lokasi domisili sementara peneliti, yaitu di Kota Semarang. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan menghimpun data yang bersifat komprehensif, valid, dan relevan, dengan menitikberatkan pada sumber-sumber ilmiah seperti jurnal akademik daring. Proses seleksi data akan dilakukan secara ketat guna memastikan keterkaitan substansial dengan topik penelitian serta menjamin keabsahan dan kredibilitas sumber yang digunakan.

1.8.3. Subjek Penelitian

Dalam konteks penelitian ini, Indonesia diposisikan sebagai salah satu subjek utama yang dikaji, mengingat peran strategisnya sebagai negara *middle power* dalam konstelasi geopolitik kawasan Asia Tenggara. Posisi Indonesia menunjukkan kecenderungan ketergantungan yang signifikan terhadap dua kekuatan besar, yakni Amerika Serikat dan Tiongkok yang masing-masing berperan sebagai penopang utama dalam aspek keamanan serta keberlanjutan perekonomian nasional. Relasi kompleks ini menjadi fokus analisis untuk memahami dinamika kebijakan luar negeri Indonesia dalam mempertahankan stabilitas dan kepentingan strategisnya di tengah rivalitas dua negara adidaya tersebut.

Lebih lanjut, analisis terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi esensial, mengingat peran keduanya sebagai arsitek utama dalam konfigurasi kekuatan di kawasan Asia Tenggara. Amerika Serikat mengartikulasikan visinya melalui pengembangan kemitraan strategis bilateral dan multilateral, serta inisiatif seperti Indo-Pacific Strategy, AUKUS, dan Quad sebagai

instrumen utama dalam mengonsolidasikan pengaruhnya. Sebaliknya, Tiongkok memproyeksikan kebijakan luar negerinya melalui program ambisius seperti Belt and Road Initiative (BRI), pendekatan diplomasi ekonomi, serta pemanfaatan forum multilateral seperti ASEAN+3 dan East Asia Summit untuk memperluas jejaring pengaruh. Konvergensi dan divergensi antara dua model kebijakan ini menciptakan kompleksitas struktural bagi Indonesia, terutama dalam menyusun strategi *hedging* di tengah dinamika sistem internasional yang volatil.

1.8.4. Jenis Data

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder, meliputi narasi tekstual, artikel ilmiah, buku referensi, grafik, tabel, ilustrasi visual, serta dokumen resmi yang memiliki relevansi substansial dengan fenomena yang dikaji. Seluruh bentuk data tersebut akan dikaji secara kritis dan digunakan sebagai basis analitis guna memperkuat argumentasi ilmiah peneliti. Dengan demikian, data yang dikumpulkan tidak hanya berfungsi sebagai informasi pendukung, tetapi juga menjadi landasan epistemologis dalam merumuskan interpretasi dan menarik kesimpulan yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer akan diperoleh melalui akses terhadap situs-situs resmi instansi pemerintahan yang menyediakan dokumentasi dalam bentuk rekaman tertulis maupun lisan yang autentik. Sementara itu, data sekunder merujuk pada informasi yang telah dihimpun dan dipublikasikan oleh pihak ketiga, seperti artikel dalam jurnal ilmiah, laporan kebijakan, maupun pemberitaan yang tersedia secara daring. Kedua jenis data ini akan dimanfaatkan secara integral oleh peneliti untuk mendukung proses analisis serta

merumuskan kesimpulan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Secara fundamental, penelitian ini berlandaskan pada pendekatan studi kepustakaan, di mana seluruh referensi yang digunakan berasal dari berbagai sumber ilmiah yang kredibel, seperti buku akademik, jurnal terindeks, laporan institusional, serta dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga kenegaraan. Di samping itu, sebagai pelengkap data, peneliti juga akan mengintegrasikan informasi yang diperoleh dari situs web terpercaya serta karya-karya ilmiah terdahulu yang telah melalui proses verifikasi akademik. Seluruh sumber tersebut akan dikaji secara kritis guna memastikan validitas dan relevansinya dalam mendukung konstruksi analisis yang dibangun dalam penelitian ini.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menerapkan metode kongruen, yakni suatu pendekatan analitis yang menekankan keselarasan antara rumusan pertanyaan penelitian dengan fokus kajian yang diangkat. Metode ini secara khusus diarahkan untuk menelusuri dan memahami relasi kausal antara variabel-variabel yang terlibat dalam suatu fenomena. Melalui pendekatan ini, peneliti akan mengidentifikasi serta mengkaji variabel-variabel pendukung yang relevan sebagai dasar dalam penyusunan analisis dan perumusan kesimpulan. Penggunaan metode kongruen dalam penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan kausalitas determinan domestik akan *hedging strategy* terhadap dinamika hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan Tiongkok.

1.8.8. Kualitas Data (*goodness criteria*)

Dalam konteks penelitian ini yang berfokus pada analisis strategi *hedging* dalam kebijakan luar negeri Indonesia di era kepemimpinan Prabowo Subianto terhadap Amerika Serikat dan Tiongkok, kualitas data atau *goodness criteria* dijaga melalui penerapan sejumlah parameter ilmiah yang diadopsi dari kerangka evaluasi penelitian kualitatif. Kredibilitas dijamin melalui proses *triangulasi sumber*, di mana peneliti membandingkan data dari berbagai dokumen resmi pemerintah Indonesia, jurnal ilmiah, serta laporan lembaga *think-tank* internasional guna memastikan konsistensi temuan. Transferabilitas dicapai dengan menyajikan deskripsi kontekstual secara mendalam terkait dinamika geopolitik Asia Tenggara sehingga memungkinkan pembaca untuk menilai relevansi temuan dalam konteks negara *middle power* lainnya. Dependabilitas dijaga dengan mendokumentasikan secara sistematis seluruh proses analisis, termasuk langkah-langkah penelusuran data, seleksi literatur, serta logika argumentatif yang digunakan, guna menjamin replikasi dalam konteks serupa. Sementara itu, konfirmabilitas ditegakkan dengan menjaga objektivitas peneliti melalui pembatasan subjektivitas interpretif, serta penggunaan *audit trail* untuk menunjukkan bahwa interpretasi yang dibangun berasal dari data yang sahih dan terverifikasi. Dengan demikian, penerapan *goodness criteria* dalam penelitian ini tidak hanya memperkuat legitimasi temuan, tetapi juga menjamin kontribusi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara epistemologis.